

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Agra, UE. (Terj. Saleh Adiwinata), 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Alder, John, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, Macmillan, London.
- Amsari, Feri, 2013, *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Rev. Ed, Cetakan Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2001, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Keempat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, M. Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta.
- Chazawi, Adami 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Franken, 1997, *Onafhankelijke en Verantwoordelijk*, Gouda Quhnt, Deventer.
- Gaffar, Janedjri M., 2009, *Kedudukan, Peran, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal MK, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Texas.
- Hadikusuma, Hilman, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2007, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, R. dan Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Bandung.
- Jackson, Vicki C., 2012, *Judicial Independence in Transition*, Springer Heidelberg Dordrecht.
- Latif, Abdul, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, dan Said Sampara, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- _____, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pusat LPES, Jakarta.
- _____, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Insitutsi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MK-RI, Jakarta.
- _____, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman)*, Sekretariat Jenderal MK-RI, Jakarta.
- Malian, Sobirin, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2000, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, HM. Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, Rev.Ed, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Phillips, O. Hood, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, 2001, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet & Maxwell, London.
- Pompe, Sebastian (Terj. Noor Kholis), 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya untuk Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.
- Saleh, Imam Anshori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Shetreet, Simon dan J. Deschenes, 1985, *Judicial Independence the Contemporary Debate*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1972, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986. *Ilmu dalam Perspektif Moral*, Alumni, Bandung.
- Sumitro, Ronny Hanityo 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tahir, Hadari Djenawi, 1982, *Herziening di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty Yogyakarta.

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wantu, Fence M., 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wijk, Van, 1984, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, S-Gravenhage, Vuga.

Wiriadinata, Wahyu, 2008, *Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum*, Cetakan Pertama, Java Publishing, Bandung.

Wiwoho, Jamal, 2006, *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*, UNS Press, Surakarta.

Zainuddin, A. Rahman, 1992, *Kekuasaan Negara – Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Antologi

Shetreet, Simon, “Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges”, dalam Shetreet and J. Deschenes (eds), 1985, *Judicial Independence the Contemporary Debate*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.

C. Hasil Penelitian

Fuadah, Akhyaroni, 2014, *Implikasi Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Konsep Negara Hukum di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lukmantara, Rifian Ernando, 2012, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review terhadap Peraturan Menteri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rudi, Muhamad, 2014, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 terhadap Sistem Pengangkatan Hakim Agung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tajudin, 2009, *Peninjauan Kembali yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pollycarpus Budiharyanto*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

D. Artikel Jurnal

Asshiddiqie, Jimly, “Judicial Review Atas Putusan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tentang TGTPK”, *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi Pertama, Tahun 2000.

Etudaiye, Muhtar Adelza, “The Doctrine of Natural Justice as an Arm of the Rule of Law in Nigeria”, *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 43, No. 3, Maret 2007.

Garlicki, Lech, “Constitutional Courts Versus Supreme Courts”, *Oxford Journal*, Vol. 5:44, No. 1, Januari 2007.

Kartika, Shanti Dwi, “Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 6, Maret 2014.

Koesnoe, Moh., “Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 29 Juni 1996.

Loewenstern, Melissa E., “The Impartiality Paradox”, *Yale Law and Policy Review*, Vol. 21, No. 2, Spring 2003.

Maladi, Yanis, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, April 2010.

Parakas, Mario, “Merajut Independensi Peradilan dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim”, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. VII, No. 3, Desember 2012.

Yale, D.E.C, “Iudex in Propria Causa: An Historical Excursus”, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 33, No. 1, April 1974.

E. Makalah/Bahan Kuliah

Horacio Spector, “Judicial Review Rights and Democracy”, *Makalah*, dalam Workshop Law and Philosophy University of North Carolina, Chapel Hill.

Musschenga, Albert W., “The Debate on Impartiality: An Introduction, Ethical Theory and Moral Praticce”, *Bahan Kuliah*, Departement of Philosophy Vrije Universiteit, Amsterdam.

Sowell, Thomas, “Judicial Activism Reconsidered”, *Bahan Kuliah*, Hoorferd Institued Stanford University, California.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah Memperoleh Kekuasaan Hukum yang Tetap, tanggal 1 Desember 1980.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Perkara Pengujian Undang-Undang, tanggal 27 Juni 2005.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tanggal 1 Desember 2006.

G. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 010/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. Dokumen Lain

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 8 April 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, tanggal 12 Juni 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, tanggal 31 Desember 2014.

I. Artikel Surat Kabar

Redaksi Kompas, "Mahkamah Agung Jangan Batasi PK", *Kompas*, 18 April 2015.

J. Artikel Internet

Asshiddiqie, Jimly, “Konsepsi Nilai Demokratis, Kebersamaan dan Ketaatan Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Konstitusi”, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi/>, diakses 22 Maret 2015.

Duhaime, “Interpretatio Cessat in Claris in Legal Definition”, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/I/InterpretatioCessatinClaris.aspx>, diakses 16 Maret 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2014”, <https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2014.pdf>, diakses 25 April 2015.

Lingkaran Survei Indonesia, “Survei Wibawa Hukum 2013”, <http://www.antaranews.com/berita/367568/survei-5606-persen-publik-tidak-puas-atas-penegakan-hukum>, diakses 22 Maret 2015.

Pengadilan Negeri Stabat, “Skema Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana”, <http://www.pnstabat.go.id/userfiles/file/SOP/SOP%20PIDANA%20LENGKAP2.pdf>, diakses 23 Mei 2015.